

2023

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 4

**BADAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN DAN SDM KP
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Pelatihan (Puslatluh KP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Puslatluh KP tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Puslatluh KP tahun 2020-2024, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Puslatluh KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Tahun 2023, Puslatluh KP telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja

Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Puslatluh KP.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pada bidang pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya selama tahun 2023.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Puslatluh KP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Puslatluh KP, dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 19 Januari 2024

**Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
KP,**



Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi dan misi Presiden Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.

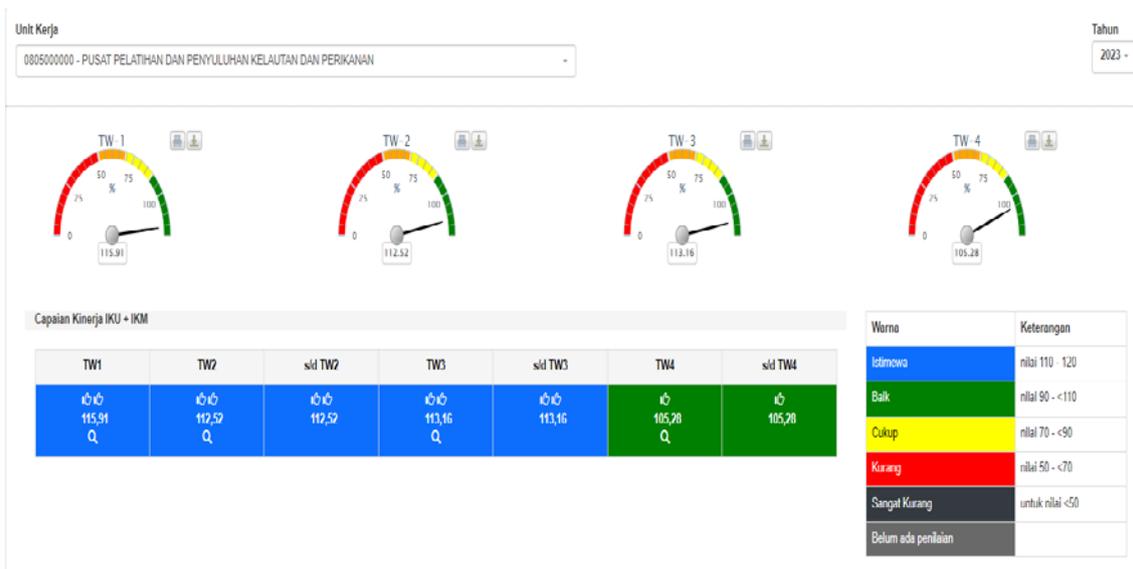
Kementerian Kelautan dan Perikanan siap melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia (SDM);
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Menghapus kendala regulasi;
4. Menyederhanakan birokrasi, dan;
5. Melakukan transformasi ekonomi.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mempunyai target PK (Revisi bulan November) Tahun 2023 untuk pelatihan sebanyak 33.113 orang masyarakat yang dilatih, pelatihan aparatur 4.960 orang, sarana pelatihan dan penyuluhan KP 10 unit,

prasarana pelatihan dan penyuluhan KP 5 unit dan 47.000 Kelompok pelaku utama yang disuluh.

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan 4 adalah 105,28% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Capaian Penetapan Kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan, sampai triwulan 4 tahun 2023 dengan target prioritas yang telah dicapai sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	74,29	106,13
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	33.113	34.518	104,24
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768	13,100	120
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890	1.958	103,60
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137	144	105,11
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10	11	110,00
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9	9	100,00
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7	7	100,00
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000	47.612	101,30

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.980	2.047	103,38
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.400	3.758	110,53
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342	12.519	101,43
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)*	9	9	100,00
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	21	21	100,00
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10	10	100,00
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5	5	100,00
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960	5.716	115,24

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10	16	120
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	100	100,00
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1	1	100,00
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	100,00
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	93	94,63	101,75
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	93	116,58	120
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP	77	89,18	115,82

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
			(indeks)			
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5	0	120,00
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	80	80	100,00
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1	1	100,00
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80	81,80	102,25

Penyerapan Anggaran Lingkup Puslatluh KP Sampai dengan triwulan 4 tahun 2023, Puslatluh KP melaksanakan DIPA TA. 2023 dengan total anggaran Lingkup Puslatluh KP sebesar Rp.662.447.185.000,- dan Pagu Puslatluh KP sebesar Rp. 14.971.385.000,-. Adapun Realisasi sampai dengan 06 Oktober 2023 tahun anggaran 2023 adalah realisasi anggaran pada DIPA Lingkup Puslatluh KP Rp. 64.5487.479.263,- (97,55%) dan Realisasi Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 14.452.071.544 (99,48 %).

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran triwulan 4 tahun 2023 capaian kinerja *output* program sudah semuanya tercapai, namun demikian untuk menghasilkan kualitas hasil kinerja yang optimal dimasa-

masa mendatang dalam penyelenggaraan program perlu melakukan berbagai hal analisa sebagai berikut:

1. Mensinergikan target pelaku usaha dan kelompok pelaku utama yang disuluh serta peserta pelatihan masyarakat yang dilatih dalam rangka efektifitas dan percepatan capaian kegiatan.
2. IKU Kelompok yang ditingkatkan dan IKU Kelompok yang dibentuk perlu dimonitring secara kontinu oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Satminkal serta Penyuluh Perikanan.
3. Verifikasi data dukung yang ribuan memerlukan SDM dan Aplikasi digital dalam verifikasi data dukungnya serta adanya monitoring data dukungnya secara bulanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Tujuan	2
	3. Tugas dan Fungsi	3
	4. Keragaan SDM	5
	5. Potensi Permasalahan	9
	6. Sistematika Pelaporan	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	1. Rencana Strategis 2020-2024	14
	a. Visi	
	b. Misi	
	c. Tujuan	
	d. Sasaran Strategis	
	e. Potensi dan Permasalahan	
	2. Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden	15
	3. Tujuan	16
	4. Sasaran Strategis	16
	5. Rencana Kerja Tahunan	27
	6. Pengukuran Kinerja	27
	a. Rumus Pengukuran	
	b. Metode Pengukuran	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	32
	1. Prestasi Kinerja	32
	2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	33

3.	Akuntabilitas Keuangan	105
4.	Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	107
BAB IV	PENUTUP	118
1.	Capaian Kinerja Utama	118
2.	Rekomendasi dan Permasalahan	122

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2023 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BRSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program riset dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BRSDM KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai Puslatluh KP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Puslatluh KP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP kepada Kepala BRSDM KP selaku Pemberi

Mandat, atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2023;

- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala BRSDM KP selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP;
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Puslatluh KP.

3. Tugas dan Fungsi

- a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri KP OTK Permen KP No.48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP serta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 " Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3) Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

c. Susunan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PUSLATLUH KP



4. Keragaan SDM

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP merupakan salah satu unit kerja dari Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM KP yang mampu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, dengan misi:

- 1) Mengembangkan kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, dan
- 2) Mengembangkan SDM kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Puslatluh KP dibantu oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, yaitu Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan-Sumatera Utara, BPPP Tegal-Jawa Tengah, BPPP Banyuwangi-Jawa Timur, BPPP Bitung-Sulawesi Utara, dan BPPP Ambon-Maluku.

Kebijakan Kepala Puslatluh KP berkaitan dengan strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan adalah:

- 1) Untuk pelatihan bagi Aparatur, mengutamakan diklat mandatory, yaitu diklat prajabatan dan diklat bagi calon tenaga fungsional;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai KKP untuk mendapatkan diklat;

- 3) Mendorong adanya pengembangan jenis dan metode pelatihan dan penyuluhan;
- 4) Mengupayakan perencanaan pelatihan dan penyuluhan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penyuluhan;
- 5) Membuat kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring;
- 6) Mendorong pencapaian sasaran dengan memanfaatkan anggaran diluar Puslatluh KP melalui kerjasama program pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana standar pelatihan secara bertahap;
- 8) Memberikan informasi pelatihan dan penyuluhan secara cepat, terkini dan akurat kepada *stakeholders*;
- 9) Mendorong tersedianya kurikulum dan media belajar bagi pelatihan teknis dan fungsional;
- 10) Mendorong tersedianya programa penyuluhan, dan materi penyuluhan dalam pendampingan kepada pelaku utama/usaha perikanan;
- 11) Memacu standarisasi pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan;
- 12) Memberikan kesempatan bagi setiap pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan kompetensi jabatan atau kompetensi kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan didukung oleh SDM yang profesional di bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, mesin perikanan dan manajemen.

Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga kepelatihan terus dilakukan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan memiliki wilayah pelatihan yang secara keseluruhan dapat melayani pelatihan di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP

No.	Satuan Kerja	Wilayah Pelatihan (Provinsi)	Keterangan
1.	BPPP Medan	Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung	8 Provinsi, 110 Kabupaten/Kota
2.	BPPP Tegal	Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng	9 Provinsi, 115 Kabupaten/Kota
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalsel	5 Provinsi, 64 Kabupaten/Kota
4.	BPPP Bitung	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim Kalut	7 Provinsi, 79 Kabupaten/Kota
5.	BPPP Ambon	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sultra	5 Provinsi, 57 Kabupaten/Kota
6.	BDA Sukamandi	Seluruh Indonesia	34 Provinsi

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tertentu, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan dapat mendatangkan Pelatih dari luar instansi guna memberikan mata pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kondisi aktual di lapangan.

Sedangkan Untuk Keragaan data jumlah Penyuluh Perikanan sebagai pendamping program prioritas KKP Tahun 2023 adalah sebanyak 4.303 orang, terdiri dari: 1). Penyuluh PNS sebanyak 2.435

orang, 2). Penyuluh CPNS sebanyak 1 orang, 3). Penyuluh PPB sebanyak 1.455 orang, dan 4). Penyuluh PPPK sebanyak 412 orang.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluhan memiliki wilayah yang secara keseluruhan dapat di seluruh Indonesia.

Tabel 2. Satminkal dan Wilayah Kerja Penyuluhan Perikanan Per. Provinsi

No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)	No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)
1.	BPPP Medan	Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau	6.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang	Bangka Belitung Jambi Bengkulu Sumsel Lampung
2.	BPPP Tegal	Jawa Tengah DI Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Timur	7.	Balai Riset Perikanan Air Tawar Bogor	Banten DKI Jakarta Jawa Barat
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur Kalimantan Selatan	8.	Balai Riset Perikanan Air Payau Maros	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
4.	BPPP Bitung	Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo			

No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)	No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)
5.	BPPP Ambon	Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat	9.	Balai Besar Riset Perikanan Budiaya Perikanan Air Laut Gondol, Bali	Bali NTB NTT Kalimantan Tengah

PROFIL SATKER LINGKUP PUSLATLUH



5. Potensi dan Permasalahan

Masalah dan tantangan tentunya dihadapi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam kiprahnya dalam mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam khususnya di bidang pelatihan diantaranya:

- A. Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:
- a) Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (Instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
 - b) Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP, mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
 - c) Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP;
 - d) Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
 - e) Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
 - f) Masih rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;
 - g) Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;

- h) Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
 - i) Standarisasi kompetensi masih terbatas jumlahnya;
 - j) Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;
 - k) Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- B. Aspek Pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya:
- a) Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;
 - b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;
 - c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
 - d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.
- C. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah; Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasikan.
- D. Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha

bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

- a) Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang memerlukan pembinaan dan pendampingan;
- b) Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;
- c) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- d) Penyebaran jumlah penyuluh perikanan relatif tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala sampai dengan tahun 2023.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2023, serta metode Pengukuran Kinerja.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan

- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.
- 6) **LAMPIRAN**, berisi lampiran PK awal , dan PK Revisi Puslatluh KP Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Nasional yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa Aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2. Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden

Kementrian Kelautan dan Perikanan siap mendukung dan melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

- 1) Membangun sumber daya manusia (SDM);
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- 3) Menghapus kendala regulasi;
- 4) Menyederhanakan birokrasi, dan;
- 5) Melakukan transformasi ekonomi.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan SDM;
- 2) Pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
- 3) Peningkatan pengawasan SDKP;
- 4) Industrialisasi kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan usaha dan investasi;
- 6) Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual; dan
- 7) Komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Kebijakan Pembangunan KKP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Nasional dalam rangka mencapai sasaran strategi pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024. Dengan demikian Kebijakan Puslatluh KP adalah:

- 1) Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;

- 2) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
- 4) Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi teknologi dan pelatihan.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

4. Sasaran KEGIATAN

Secara rinci Puslatluh KP memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut ditetapkan melalui tahapan-tahapan program berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan dengan indikator kinerja utama sebanyak 28 IKU dengan target seperti tabel dibawah ini.

Tabel.3. Sasaran Kegiatan Puslatluh Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	24.163
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	33.113
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.980
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.400
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)*	9
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	21
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	93
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	80
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2023 diatas, Puslatluh KP menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berbasis Logical framework.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi

dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.

Target tersebut ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja utama untuk tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*).

Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja Level 2 Puslatluh mengalami 2 kali perubahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2023 Puslatluh memiliki 9 Sasaran Program dan 17 Indikator Kinerja Utama serta 11 Indikator Kinerja Manajerial.
2. Pada bulan Juni PK Puslatluh mengalami perubahan Target sesuai Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Nomor B.843/BRSDM.5/TU.210/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Permohonan Pengesahan Perjanjian Kinerja Level 2 Puslatluh Tahun 2023. Target Indikator Kinerja yang berubah adalah sebagai berikut:
 - a. Perubahan volume pada IKU Masyarakat yang dilatih (orang), target semula 31.940 orang menjadi 32.224 orang.
 - b. Perubahan volume Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar), target semula 9,597 menjadi 9,768
 - c. Perubahan volume Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang), target semula 1.800 menjadi 1.890
 - d. Perubahan volume Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok), target semula 9 menjadi 24
 - e. Perubahan volume Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit), target semula 6 menjadi 10

- f. Perubahan volume Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit), target semula 4 menjadi 5
 - g. Perubahan volume Aparatur KP yang dilatih (orang) target semula 4.770 menjadi 4.960
3. Pada bulan November PK Puslatluh mengalami perubahan Target Indikator Kinerja. Sasaran Program PK November menjadi 9 Sasaran Program dan 28 Indikator kinerja yang terbagi menjadi 17 Indikator Kinerja Utama serta 11 Indikator Kinerja Manajerial sesuai Memorandum Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Nomor 659/BPPSDM.5/RC.610/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Permohonan Pengesahan Perjanjian Kinerja Level 2 Puslatluh Tahun 2023. Adapun Target Indikator Kinerja yang berubah adalah sebagai berikut:
- a. Masyarakat yang dilatih (orang), target semula 32.224 orang menjadi 33.113 orang.
 - b. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok), target semula 3.000 Kelompok menjadi 3.400 Kelompok.
 - c. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok), target semula 1.800 Kelompok menjadi 1.980 Kelompok.
 - d. Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa), target semula Desa 6 menjadi 9 Desa SFV.
 - e. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDM (%), target semula 75% menjadi 80%.
 - f. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai), target semula 92 menjadi 93.

Tabel 4. PK Puslatluh Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
				PK AWAL	PK REVISI 1 (Juni)	PK 2023 (November)
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia	70	70	24.163

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
				PK AWAL	PK REVISI 1 (Juni)	PK 2023 (November)
	Perikanan		Usaha dan Dunia Industri (%)			
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.940	32.224	33.113
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,597	9,768	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.800	1.890	1.890
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137	137	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10	10	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9	9	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7	7	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000	47.000	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800	1.800	1.980

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
				PK AWAL	PK REVISI 1 (Juni)	PK 2023 (November)
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000	3.000	3.400
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342	12.342	12.342
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)*	6	6	9
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	9	24	21
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	6	10	10
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	4	5	5
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.770	4.960	4.960
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10	10	10

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
				PK AWAL	PK REVISI 1 (Juni)	PK 2023 (November)
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	100	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1	1	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92	92	93
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92	92	93
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77	77	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
				PK AWAL	PK REVISI 1 (Juni)	PK 2023 (November)
			(%)			
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	80	80	80
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1	1	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80	80	80

6. Rencana Kerja Tahun 2023

Adapun kegiatan prioritas Puslatluh KP termasuk UPT Pelatihan KP dan Satminkal Penyuluhan KP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kinerja utama yaitu:

1. Pelatihan Masyarakat.

Pelatihan masyarakat akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 31.940 orang dan ada penambahan *output* di PK Revisi Juni menjadi 32.224 orang dan di Revisi November sebanyak 33.113 orang, yang difokuskan kepada pelatihan-pelatihan dengan metode *blended*/campuran dan pelatihan full online/open akses. Pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai

Diklat, yaitu: BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Aertembaga, dan BPPP Ambon.

2. Pelatihan Aparatur.

Pelatihan aparatur bagi 4.770 orang dan adanya revisi *output* menjadi 4.960 orang ASN KKP adalah sebagai upaya KKP untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur KP, dilakukan melalui penyelenggaraan diklat struktural, teknis, fungsional, dan prajabatan yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi dengan metode online/daring/blended menggunakan aplikasi e-milea.

3. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang disuluh

Penyuluhan diberikan kepada 47.000 Kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS maupun Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dengan pengendalian kinerja dilaksanakan oleh 9 (Sembilan) Satminkal Penyuluh Perikanan, dengan target kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan kelas kelompok pelaku utama/usaha, dan pembentukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi Sektor KP.

NO.	KEGIATAN	PK JANUARI	PK JUNI	PK NOPEMBER
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	128.466.010.000	130.247.884.000	130.247.884.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KP	3.000.000.000	3.621.087.000	3.621.087.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP	525.061.966.000	662.447.185.000	527.977.723.000
	JUMLAH	656.527.976.000	796.316.156.000	661.846.694.000

7. Pengukuran Kinerja

A. Rumus Pengukuran Kinerja

Kinerja penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan KP sebagai usaha penciptaan SDMKP yang memiliki kompetensi untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan masih memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut antara lain adalah belum terukurnya kinerja pelatihan dan penyuluhan KP. Penyelenggaraan pelatihan KP tidak jarang penyelenggara pelatihan, baik Puslatluh KP dan UPT Pelatihan, maupun P2MKP merasa kecewa karena dinilai tidak memiliki kinerja yang standar. Mereka menganggap telah terjadi manipulasi data oleh penilai. Bisa saja itu terjadi kalau penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan dilakukan dengan ukuran subyektif. Dengan kata lain terjadi peluang munculnya bias. Di sini, bias merupakan distorsi pengukuran yang tidak akurat. Meskipun pelatihan bagaimana melakukan penilaian kerja dapat mengurangi bias, maka bias sering terjadi ketika penilaian tetap tidak lepas dari unsur emosional para penilai.

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Ausguidline, 2005).

Selama ini pemanfaatan **Logical Framework Analysis** masih terbatas bertujuan untuk melakukan proses perencanaan proyek yang bersifat partisipatoris dan berorientasi tujuan. Teknik ini memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam suatu rencana/ program untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi. Padahal *LFA* merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (*output*) dan dampak program (*outcome*) akan dimonitor dan dievaluasi dan penyajian ringkasan program dalam suatu format standard.

LFA digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajagan dalam penyusunan proposal, menyiapkan disain proyek/ program dalam suatu sistematika dan kaitan yang masuk akal, penilaian

disain proyek/ program, memutuskan persetujuan untuk pelaksanaan proyek/ program, monitoring dan evaluasi kemajuan (progress) dan kinerja (performance) program.

LFA juga dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan program, atau tepatnya kemampuan teknis, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan teknis dalam menyelenggarakan suatu program. Logical Framework sebagai kemampuan teknis program karena dapat digunakan sebagai alat untuk Perencanaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat.

Kerangka logika sebagai teknis dalam mengkombinasikan Logika Vertikal maupun Logika Horisontal. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus.

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matrix atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu:

Hubungan antara *Goals*, *Objectives*, *Outputs* dan *Activities* Logika Vertikal dan Logika Horisontal Indikator Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program *Goals* dalam kerangka logis (*logframe*) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi diluar control program. *Objectives* atau sasaran program merupakan Rincian/ Bagian dari *Goal*, namun objectives atau sasaran ini selalunya diluar kontrol program. *Goal* dan *Objectives* diluar kontrol program karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang lainnya. Sedangkan *Outputs* itu sendiri adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program

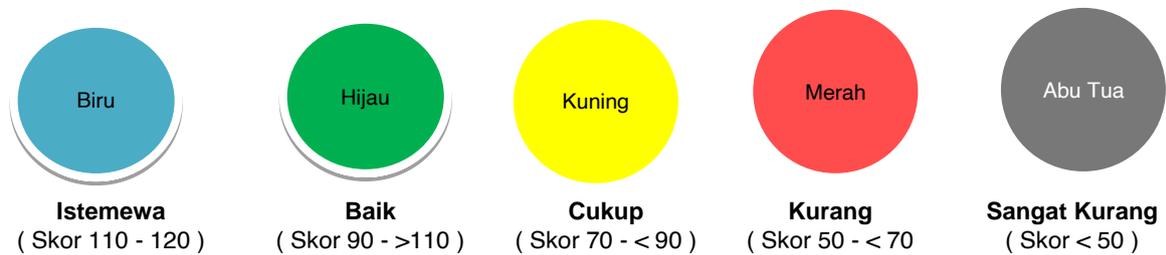
berakhir dan Activities adalah Kegiatan-kegiatan apa yang harus disusun untuk memperoleh *outputs*.

Dalam matriks logframe kita juga dapatkan istilah *Objectively Verifiable Indicators* atau disingkat OVI yaitu atau dalam bahasa Indonesia disebut indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan *SMART* (*Specific, Measurable, Attainable, Realibility and Timely*).

B. Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

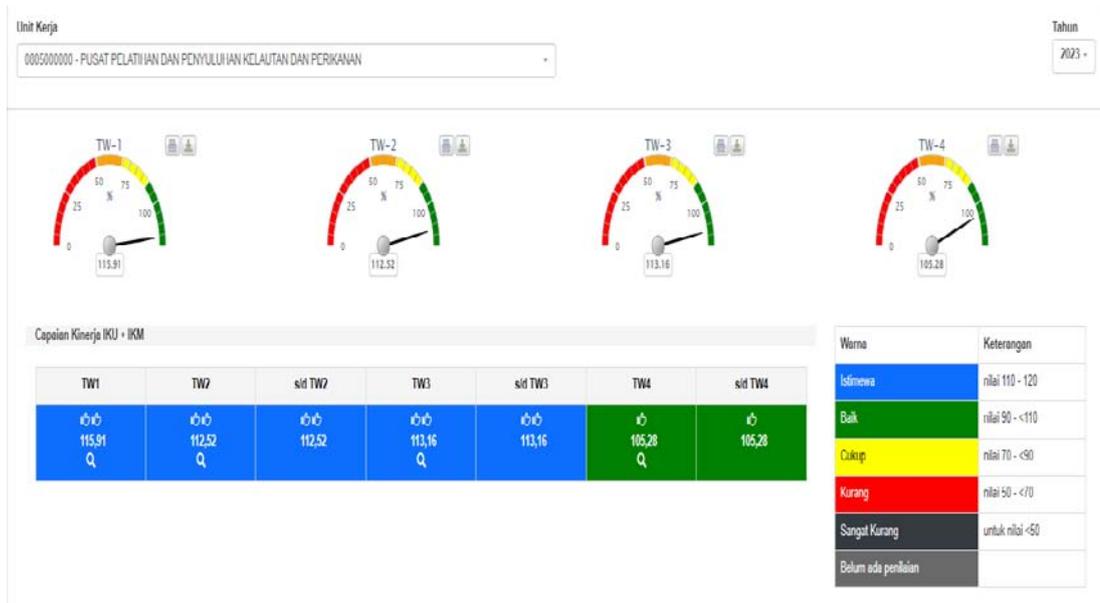
Metode pengukuran kinerja lingkup Puslatluh dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan Surat Tugas nomor B.31/BPPSDM.5/KP.440/I/2024 tanggal 09 Januari 2024. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat-pusat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Prestasi Kinerja Puslatluh KP

A. Nilai Kinerjaaku “BAIK”

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan 4 adalah 105,28% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



B. Keberhasilan Tahun 2023

Capaian keberhasilan khususnya untuk tahun 2023 adalah capaiannya dalam beberapa IKU Utama sudah melebihi target yang ditetapkan.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Puslatluh KP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 5. Capaian Kinerja Triwulan 4 tahun 2023 pada Puslatluh KP

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	74,29	106,13
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	33.113	34.518	104,24
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768	13,100	120
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890	1.958	103,60
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137	144	105,11
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10	11	110,00

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9	9	100,00
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7	7	100,00
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000	47.612	101,30
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.980	2.047	103,38
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.400	3.758	110,53
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342	12.519	101,43
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)*	9	9	100,00
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	21	21	100,00
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10	10	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5	5	100,00
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960	5.716	115,24
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10	16	120
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	100	100,00
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1	1	100,00
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	100,00
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	93	94,63	101,75
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	93	116,58	120
		24	Indeks Profesionalitas ASN	77	89,18	115,82

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
			Puslatluh KP (indeks)			
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5	0	120,00
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	80	80	100,00
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1	1	100,00
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80	81,80	102,25

Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.01.01

Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

DUDI adalah singkatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dunia usaha berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan aspek-aspek dan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia industri berkaitan dengan segala pekerjaan untuk merancang, membuat, menghasilkan suatu produk.

Tabel 7. Capaian IKU Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri terhadap Renstra

SS-1								
Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan								
IKU-1								
Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Orang	% Capaian
%			70	74,29	106,13%	13,92%	75	99,05%

Pada indikator kinerja ini target jumlah lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri KP pada tahun 2023 sebesar 70 % Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan 4, Capaian Purnawdiya yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebanyak 25.644 orang atau 74,29%, dan Perbandingan dengan Tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 13,92%.

Tabel 8. Rekap IKU Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri Per satker

No	Saminkal	Target (%)	Capaian Masyarakat Dilatih T. 2023 (Orang)	Capaian DUDI (Orang)	Capaian DUDI (%)
1	BPPP MEDAN	70	3.200	2.240	70,00
2	BPPP TEGAL	70	17.759	13.822	77,83
3	BPPP BANYUWANGI	70	6.869	4.808	70,00
4	BPPP BITUNG	70	3.130	2.200	70,29
5	BPPP AMBON	70	3.560	2.574	72,30
	Total	70	34.518	25.644	74,29

No	Indikator	Target Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2023 (%)
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	74,29
	Puslatluh	70	74,29

Jika dianalisa lebih lanjut Permasalahan yang dihadapi Puslatluh KP dalam menetapkan data capaian tersebut adalah Kegiatan Pelatihan sebagian besar menggunakan pelatihan online sehingga lokasi nya sulit di pantau, peserta pelatihan online sebagian besar bukan pelaku usaha yang sudah berjalan, dan kurangnya anggaran Evaluasi Pasca Pelatihan dalam memantau kegiatan outcome kegiatan Dudi ini, walau begitu tidak mempengaruhi Puslatluh dan UPT dalam menyiapkan outcome Dudi tersebut sehingga capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Peserta pelatihan wajib mengisi nomor kontak sehingga mempermudah dalam melakukan evapasca pelatihan;
2. Berkoordinasi dengan penyuluh dilapangan;
3. Berkoordinasi dengan Perusahaan, Tempat usaha, Pengusaha kapal dalam melaksanakan evapasca pelatihan.

Hal ini dari terdapat **upaya upaya** yg telah dilaksanakan oleh Puslatluh yaitu : membuat instrumen evaluasi pasca pelatihan yang disebarakan kepada semua UPT, melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh di lapangan, menyebarkan formulir evapasca pelatihan kepada para purnawidya pelatihan kp.

Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.01.02 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih

IKU terkait Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan kelautan dan perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

IKU Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis APBN;
- 2) Peserta merupakan masyarakat (non ASN);
- 3) Penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan model Blended (kombinasi online dan tatap muka).

Tabel 9. Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih terhadap Renstra

SS-1			Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan					
IKU-2			Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
Orang							Orang	
12.120	15.035	29.098	33.113	34.518	104,24	18,63%	58.000	59,51%

Pada Tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Selama Tahun 2020-2023 Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang telah dilatih sebanyak 90.771 orang, dengan mengalami kenaikan sebesar 18,63% dari tahun 2022, Adapun Capaian IKU jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP pada triwulan 4 tahun 2023 sebesar 34,518(104,24%). Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan 4 tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 18,63 %. Capaian triwulan 4 terhadap Renstra Puslatluh 2024 telah sebesar 59,51%. Adapun sebaran masyarakat KP yang dilatih sebagai berikut ini:

Tabel 10. Rekap IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih Per satker

No	Balai	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	3.200	3.200	100,00
2	BPPP TEGAL	16.710	17.759	106,28
3	BPPP BANYUWANGI	6.809	6.869	100,88
4	BPPP BITUNG	2.980	3.130	105,03
5	BPPP AMBON	3.414	3.560	104,28
	Total	33.113	34.518	104,24

Peningkatan kompetensi masyarakat KP ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknis maupun manajerial di bidang kelautan dan perikanan, seperti penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, permesinan perikanan, budidaya ikan, dan pengolahan garam. Selain itu kegiatan pelatihan regular teknis seperti BST dan sertifikasi Ankapin/Atkapin juga tetap dilaksanakan dan menjadi kegiatan pelatihan yang juga dapat menghasilkan PNBPN untuk masing-masing Balai pelaksanaannya. Beberapa jenis pelatihan yang diadakan oleh Balai tergolong sebagai pelatihan Aspirasi yang merupakan kerjasama antara KKP dengan anggota DPR/DPD asal wilayah/ daerah tertentu. Pelatihan ini secara khusus memberikan dukungan kegiatan pelatihan KP terhadap masyarakat di daerah pemilihan dari anggota DPR/DPD tersebut.

Jika dianalisa lebih lanjut secara umum **penyebab keberhasilan kegiatan pelatihan bagi masyarakat Triwulan 4 Tahun 2023** disebabkan oleh:

- 1) IKU ini dapat tercapai disebabkan antara lain karena adanya terobosan dalam melaksanakan pelatihan yaitu menggunakan sistem pelaksanaan pelatihan on-line.
- 2) Biaya Pelaksanaan Pelatihan sangat murah disebabkan menggunakan metode online.
- 3) Adanya antusias peserta dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan kp.
- 4) Adanya Kerjasama dengan Dinas, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kp.

hal ini telah dilaksanakan **upaya upaya** yang telah dilaksanakan sebagai berikut: berkoordinasi dengan BPPSDMKP dalam menambah output kegiatan pelatihan kp, melakukan koordinasi dengan anggota dewan dalam melaksanakan pelatihan aspirasi, melakukan kerjasama dengan pemda, NGO, Perusahaan, lembaga swasta lainnya dalam pemanggilan peserta pelatihan.

Sasaran Program SK.01 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.01.02

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. PNBP yang dilakukan oleh Puslatluh KP adalah dengan kegiatan Pelatihan, dan Sarana Prasarana Gedung dan Worskhop.

Tabel 11. P Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP terhadap Renstra

SS-1		Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan						
IKU-3		Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023					
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
Rupiah milyar							Rupiah milyar	
0	0	6,24	9,768	13,100	120	109,94%		

Pada Tabel diatas bahwa Capaian IKU ini pada Triwulan 4 Tahun 2023 sebesar Rp. 13.109.589.612,-. dari target sebesar 9.768.322.000,- Untuk perbandingan dengan Triwulan 4 tahun 2022 sebesar 6.240.000.000 atau adanya kenaikan sebesar 109,94% dari Tahun 2023.

Tabel 12. Rekap IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

No	Level 2	Target	Capaian	
1	BPPP MEDAN	374.600.000	431.200.567	0,41
2	BPPP TEGAL	7.191.508.000	9.173.472.285	9,17
3	BPPP BANYUWANGI	565.000.000	1.455.152.283	1,42
4	BPPP BITUNG	187.865.000	418.164.997	0,42
5	BPPP AMBON	570.349.000	710.311.450	0,70
6	BDA SUKAMANDI	879.000.000	921.288.030	0,92
Total		9.768.322.000	13.109.589.612,00	13,04

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
1	Puslatluh	9.768.322.000	13.109.589.612	13,04

Jika dianalisa lebih lanjut secara umum **penyebab keberhasilan PNBP pada Triwulan 4 Tahun 2023** disebabkan oleh:

- 1) Banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh BPPP dan BDA Sukamandi dengan Pemerintah daerah dan instansi lain;
- 2) Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan dan Penyuluhan dapat di sewakan sebagai pemasukan PNBP;
- 3) Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan PNBP.

Adapun **upaya-upaya** yg telah dilakukan adalah : melakukan kerjasama dengan Perusahaan penangkapan ikan, sekolah sekolah perikanan, lembaga NGO dalam perekrutan peserta pelatihan sehingga ada pemasukan PNBP, dan hal lainnya adanya biaya sewa peralatan dan menyewaan gedung auditorium.

Sasaran Program SK.02

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.02.01

SDM KP yang bersertifikat kompetensi

Sebagai upaya pengakuan dan perlindungan atas kompetensi yang dimiliki oleh SDM KP, khususnya tenaga kerja sektor KP, maka Puslatluh KP melalui Balai Diklat pada tahun 2023 telah menetapkan target untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi SDM KP sebanyak 1.890 orang, Indikator kinerja utama untuk Sasaran Strategis ini adalah jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.890 orang, yang dihasilkan oleh 5 (lima) BPPP.

IKU dari sasaran strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah meningkatnya kompetensi SDM KP yang dihasilkan dari proses pelatihan dan penyuluhan KP adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

BRSDM sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP, sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab atas pencapaian IKU tersebut, dengan indikator yang hendak dicapai adalah jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberi kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi dibawah dan dibentuk oleh BNSP dan lembaga diklat yang merupakan approval untuk melakukan diklat kepelautan internasional dengan mengacu pada standar SKKNI, SK3, dan IMO Course.

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui kegiatan sertifikat kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai tugas/jabatan yang dimiliki sesuai standar kompetensi yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sertifikasi kompetensi ini juga memberikan manfaat kepada perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan remunerasi sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki.

Tabel 13. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi terhadap Renstra

SS-3			Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
IKU-4			Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Orang	% Capaian
Orang			1.890	1.958	103,60	120%	10.000	19,58%

Pada Triwulan 4 tahun 2023 Target sebanyak 1.890 orang dengan realisasi sebesar 1.958 orang (103,60%) sedangkan pada tahun 2022 triwulan 4 sebanyak 609 orang atau terjadi kenaikan sebesar 221%. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 19,58%. Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang diuji kompetensinya. Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi baik purnawidya pelatihan maupun dari dunia usaha, dan dunia industri.

Selama periode tahun 2017 sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 ini, secara kumulatif Puslatluh KP telah mampu merealisasikan target kinerja sebesar 19.059 orang yang mengikuti uji kompetensi untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 14. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi

No	Satminkal	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	90	108	120,00
2	BPPP TEGAL	1.440	1468	101,94
3	BPPP BANYUWANGI	180	184	102,22
4	BPPP BITUNG	90	108	120,00
5	BPPP AMBON	90	90	100,00
Total		1.890	1.958	103,60

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
1	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890	1.958	103,60
Puslatluh		1.890	1.958	103,60

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah:

1. telah adanya approval assesor pelaksanaan uji kompetensi oleh BNSP yang diwakili oleh LSP KP;
2. Permen KKP no.33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, adapun dalam PermenKKP ini untuk Sertifikat Awak Kapal Perikanan wewenang Dirjen Tangkap KKP pada Pasal 127 ayat 2-4 sudah dapat diterapkan;

3. telah adanya kerjasama dengan Perusahaan peserta uji kompetensi.

Adapun **upaya upaya** Puslatluh yang telah dilakukan dalam meningkatkan outcome tersebut yaitu: kerjasama dengan BNSP dalam kegiatan uji sertifikasi, Memperpanjang akreditasi balai pelatihan sebagai tempat TUK, melakukan kerjasama dengan Perhubungan laut dalam sertifikasi pengawakan kapal perikanan, melakukan approval kelembagaan dengan Sertifikasi Manajemen mutu (ISO 9001).

Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan

Indikator Kinerja IKS.03.01

Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)

Startup adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Saat ini, istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi.

Puslatluh sebagai lembaga pelatihan masyarakat mempunyai tugas dalam pelatihan terhadap masyarakat perikanan sehingga menjadi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada indikator kinerja ini Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)(orang) target jumlah lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) pada tahun 2023 sebesar 137 orang.

Tabel 15. Capaian IKU Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) terhadap Renstra

SS-3		Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP						
IKU-5		Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	% Capaian
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023		
Orang			Orang				Orang	% Capaian
27	59	118	137	144	105,11%	22,03%	155	92,90%

Dan untuk capaian pada IKU ini telah terdapat capaian pada Triwulan 4 tahun 2023 sebanyak 144 orang, dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 22,03%, dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 92,90%.

Tabel 16. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi

No	Satuan Kerja	Target	Capaian	%
1	BPPP Medan	22	22	100,00
2	BPPP Tegal	47	50	106,38
3	BPPP Banyuwangi	36	36	100,00
4	BPPP Bitung	16	20	125,00
5	BPPP Ambon	16	16	100,00
Total		137	144	105,11

Adapun Penyebab Keberhasilan IKU ini adalah :

1. Telah adanya kerjasama dengan Perusahaan perusahaan e-commerce, Bank, dinas kp dalam penyiapan manajemen dalam wirausaha dan penggunaan media sosial.

2. Komitmen Pimpinan Balai dan jajarannya dalam pemantauan Purnawidya.
3. Adanya pendampingan oleh Penyuluh Perikanan terhadap purnawidya pelatihan.

Adapun **upaya upaya** yang dilakukan selama ini oleh Puslatluh KP dan UPT dalam meningkatkan outcome tersebut yaitu: adanya pemantauan terhadap purnawidya pelatihan dengan melakukan evapasca pelatihan dan berkoordinasi dengan penyuluhan perikanan di lapangan untuk melihat purnawidya mana yang telah menerapkan hasil perikanannya untuk menjadi wirausaha e-commerce sehingga penyuluh dapat mendampingi menjual produknya menggunakan media sosial.

Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan

Indikator Kinerja IKS.03.02 Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya

Salah satu Penyelenggaraan fungsi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan upaya menjadikan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur sektor kelautan dan perikanan dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional.

Untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, salah satu strategi yang ditempuh adalah secara terus menerus meningkatkan profesionalisme para pelatih.

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan kp yang ditetapkan adalah diterapkannya kurikulum berdasarkan kompetensi kerja dimana pelaksanaan proses berlatih dan melatih dengan menggunakan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GGBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu hasil pelatihan yang ditandai dengan meningkatnya

pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta yang lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya pelatih yang profesional, yakni pelatih yang menguasai dan mampu melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk meningkatkan serta mendorong tumbuhnya sikap lebih percaya diri para pelatih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap pelatih di Lembaga Pelatihan perlu melaksanakan kajiwidya sesuai dengan materi yang dilatihkan.

Kajiwidya adalah kegiatan pelatih untuk belajar atau berlatih sendiri, melakukan, mengamati dan menganalisis suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja pelatih sesuai dengan substansi mata diklat. Pelatih lembaga pelatihan terdiri dari widyaiswara, instruktur, dan widyaiswara/instruktur luar biasa.

Tabel 17. Capaian IKU Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya terhadap Renstra

SS-6		Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan						
IKU-13		Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (Paket)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target Paket	% Capaian
Paket								
-	21	6	10	11	110,00	83,33%	20	55,00%

Dalam tabel diatas dapat dilihat terdapat kenaikan pada tahun 2023 dengan tahun 2022 sebesar 83,33% dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 55%, Adapun Penyebab Keberhasilan IKU ini adalah :

1. Telah adanya kerjasama dengan Perusahaan instansi lain dalam menyusun bahan ajar kajiwidya dan tempat praktek.
2. Komitmen Pimpinan Balai dan jajarannya dalam pemantauan Purnawidya dengan menyiapkan Bahan ajar NSPK.

Adapun **upaya upaya** yang telah dilakukan oleh Puslatluh dan UPt nya yaitu sebagai berikut: penyiapan proposal materi kaji widya yang akan dilaksanakan oleh Widyaiswara dan Instruktur sehingga materinya nanti dapat dipergunakan dalam metode pembelajaran pelatihan, bekerjasama dengan Pusat Riset Perikanan dan Pusat Riset Kelautan serta Balai Riset Biotek KP dalam menyiapkan materi kajiwidya.

Tabel 18. Rekap IKU Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya

No	Satuan Kerja	Target	Capaian	%	Judul Kaji widya/Terap
1	BPPP Medan	2	2	100,00	1. Budidaya udang vaname dengan menggunakan tambak plastik HDPE
					2. Pembuatan bak budidaya ikan hias dengan fiberglass berfiltrasi Resirculating filtered system
2	BPPP Tegal	2	3	120,00	1. Pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Piko-Hidro
					2. Mesin Pencetak Pakan Apung
					3. Pemanfaatan unit resirkulasi corong penetasan pada kegiatan pembenihan ikan bawal air tawar
3	BPPP Banyuwangi	2	2	120,00	1. Budidaya Kerang Hijau di Desa Bangsring Kec.Wongsorejo Kab. Banyuwangi
					2. Pembesaran Ikan Nemo
4	BPPP Bitung	2	2	100,00	1. Pembuatan Alat Tangkap Pancing Noru
					2. Mesin pembuat es batu menggunakan outdoor AC
5	BPPP Ambon	2	2	100,00	1. Pembesaran Lobster Air Laut pada Wadah Terkontrol dan Karamba jaring Apung
					2. Rancang Bangun Mesin Pendingin Sederhana bagi Kapal di Bawah 5 GT
	Total	10	11	110,00	

No	Satuan Kerja	Target	Capaian	%	Judul Kaji widya/Terap
----	--------------	--------	---------	---	------------------------

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10	11
	Puslatluh	10	11

Sasaran Program SK.04 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.04.01

Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)

Dalam rangka meningkatkan tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang profesional agar mampu bersaing dipasar global perlu adanya petunjuk/ pedoman untuk para penyelenggara pelatihan yaitu antara lain adanya Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan kerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Untuk mewujudkan pelatihan kerja tersebut, dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Beberapa keuntungan pelatihan berbasis kompetensi diantaranya adalah pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, praktis, ada kepastian pengakuan bagi peserta pelatihan dari dunia usaha sebagai pengguna jasa. pelatihan berbasis kompetensi ini berorientasi dengan dunia kerja, dimana program dan materinya merupakan turunan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait dan disyahkan melalui Keputusan Menakertrans , dengan demikian maka diharapkan lulusan (output) pelatihan ini dapat

memenuhi kebutuhan dunia kerja. Bagi peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan akan memperoleh pengakuan apabila peserta dinyatakan lulus melalui uji kompetensi yang diselenggarakan setelah tahapan proses pelatihan dapat diselesaikan oleh peserta pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memenuhi akan kebutuhan informasi dan pedoman yang diperlukan oleh lembaga penyelenggara pelatihan.

Tabel 19. Capaian IKU Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK) terhadap Renstra

SS-4			Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP					
IKU-7			Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	% Capaian
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023		
NSPK							Target 2024 NSPK	% Capaian
-	4	6	9	9	100,00	50,00%	4	120,00%

Terdapat kenaikan tahun 2023 dengan tahun 2022, Capaian IKU ini sebesar 50%, dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120% hal ini disebabkan adalah :

1. Telah adanya kerjasama dengan instansi terkait lingkup KKP dalam penyusunan NSPK dalam pemenuhan bahan ajar untuk peserta pelatihan masyarakat dan pelatihan ASN.
2. Komitmen Pimpinan Balai dan jajarannya dalam pemantauan Purnawidya.

Maka perlu dilakukan **upaya upaya** dalam memenuhi kegiatan tersebut yaitu : perlunya disusun Norma, Standar, Pedoman dan Kurikulum Pelatihan dan Penyuluhan dengan bekerjasama dengan eselon 1 lingkup KKP, bekerjasama dengan Kementranker RI dalam menyiapkan NSPK dan berkordinasi dengan Biro Hukum dan KLN KKP, adanya Pelatihan yang mengacu kepada kompetensi kerja selanjutnya dikenal sebagai Pelatihan

Berbasis Kompetensi (Competency Based Training/CBT) yang baru dikembangkan di Indonesia.

Sasaran Program SK.04 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.04.02

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang terstandar di bawah BRSDM yang masih berlangsung. Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan.

Lembaga pelatihan yang terstandar merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan layanan pelatihan dan penyuluhan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan standardisasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, meliputi standardisasi: program, lulusan, evaluasi, biaya, proses, ketenagaan, serta standardisasi sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP.

Dengan sistem manajemen mutu (QMS) yang efektif ini, maka Balai memiliki akan struktur yang lebih jelas, pendekatan sistematis untuk meningkatkan layanan kepada setiap peserta latih, serta membantu untuk pengendalian dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan akreditasi QMS ini juga akan memberikan manfaat kepada Balai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat kesalahan yang mengarah pada peningkatan produktivitas Balai.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan KP sejak tahun 2017 telah terakreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Dimana terdapat 7 karakteristik

utama yaitu; pendekatan pro aktif, integrasi mutu ke dalam proses bisnis, performance, mengikuti siklus PDCA, penyesuaian lingkup dengan komitmen organisasi, bersifat sukarela, dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai. Dengan akreditasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada balai dalam peningkatan kepuasan layanan kepada peserta latih, seperti pembuatan Pelayanan Pelatihan Terpadu satu Pintu (PTSP) di beberapa balai, pengurangan biaya pelatihan tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan pelatihan dan mutu lulusan pelatihan, serta mampu mengurangi permasalahan atau sengketa antara bagian dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi.

Tabel 20. Capaian IKU Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga) terhadap Renstra

SS-4		Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP						
IKU-8		Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	% Capaian
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023		
Paket							Paket	
6	7	7	7	7	100,00	0,00%	7	100,00%

Pada tahun 2023 ini, telah dilakukan audit internal atas akreditasi ISO 9001:2015 yang diperoleh 7 lembaga, yakni Puslatluh KP BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung dan BPPP Ambon, serta BDA Sukamandi pada tahun 2023. Capaian IKU ini pada triwulan 4 sebesar 7 lembaga akreditasi atau sebesar 100%, perbandingan dengan tahun 2022 tetap sama yaitu 100%, dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 100%. dan Diharapkan dengan hasil audit yang menyatakan bahwa organisasi masih sesuai dengan persyaratan sistem manajemen, organisasi masih mengimplementasikan kebijakan dan SOP seperti yang sudah ditetapkan, dan secara berkala melalui auditor internal telah melakukan peninjauan dan

peningkatan manajemen mutu melalui audit internal dan tinjauan manajemen, serta tindakan perbaikan yang berkelanjutan sesuai sistem manajemen dan monitoring sasaran mutu.

Tabel 21. Rekap IKU Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)

No	Satuan Kerja	Target	Capaian	Persentase
1	Puslatluh KP	1	1	100,00
2	BDA Sukamandi	1	1	100,00
3	BPPP Tegal	1	1	100,00
4	BPPP Medan	1	1	100,00
5	BPPP Banyuwangi	1	1	100,00
6	BPPP Bitung	1	1	100,00
7	BPPP Ambon	1	1	100,00
	Total	7	7	100,00

Tidak ada kenaikan capaian dari tahun sebelumnya, adapun Faktor Keberhasilan yaitu:

1. Telah adanya kerjasama dengan Perusahaan Manajemen Mutu.
2. Komitmen Pimpinan Balai dan jajarannya melaksanakan self assesment;
3. Telah dilaksanakan Diklat Manajemen Mutu setiap tahun oleh Puslatluh.

Upaya Upaya yang telah dilakukan oleh Puslatluh dan UPT adalah ebagai berikut: telah dilakukan akreditasi kelembagaan sebanyak 7 (tujuh) lembaga pelatihan di bawah koordinasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan SDM KP dan dilakukan *self assesment* setiap tahun oleh assesor manajemen mutu yaitu audit pemantauan yang wajib dilakukan oleh badan sertifikasi independen setiap 1 tahun sekali terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO, yang bertujuan untuk menentukan apakah 6 lembaga tersebut masih berhak menyandang sertifikat ISO 9001:2015 atau tidak.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.05.02 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh

IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.000 orang, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 22. Capaian IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh terhadap Renstra

SS-5		Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU-9		Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (kelompok)							
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024		
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Kelompok	% Capaian	
Kelompok			47.000	47.612	101,30	0,91%	55.000	86,57%	
47.754	47.378	47.181	47.000	47.612	101,30	0,91%	55.000	86,57%	

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.000 orang berbeda dengan tahun 2022 yang sebesar 45.000 kelompok. Adapun capaian tahun 2023 pada triwulan 4 sebesar 47.612 kelompok (101,30%) dengan target 47.000 kelompok sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 47.181 kelompok atau terjadi kenaikan 0,91%. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 86,57%.

Tabel 23. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh

No	Saminkal	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	6.200	6.208	100,13
2	BPPP TEGAL	6.400	6.400	100,00
3	BPPP BANYUWANGI	6.100	6.100	100,00
4	BPPP BITUNG	3.450	3.450	100,00
5	BPPP AMBON	2.750	3.015	109,64
6	BRPPUPP Palembang	5.600	5.633	100,59
7	BRPBATPP Bogor	3.800	3.800	100,00
8	BBRBLPP Gondol	5.200	5.487	105,52
9	BRPBAPPP Maros	7.500	7.519	100,25
Total		47.000	47.612	101,30

Tabel 24. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh Perbidang usaha

Satminkal	Bidang Usaha						
	Budi daya	Gar am	Penang kapan	Penang kapan	Pengawasan/K onservasi	Pengolahan/P emasaran	Grand Total
BPPP Medan	3600	81	2023	6	11	487	6208
BRPBATPP Bogor	2836	23	451		16	474	3800
BPPP TEGAL	4136	93	1363		41	767	6400
BPPP Banyuwangi	3459	119	1643	2	35	842	6100
BBRBLPP Gondol	2543	94	2137		32	681	5487
BPPP Ambon	703		1977		11	324	3015
BPPP Bitung	1360	11	1764		8	307	3450
BRPBAPPP Maros	4059	30	2817		10	603	7519
BRPPUPP Palembang	3742	1	1175		15	700	5633
Grand Total	26.438	452	15.350	8	179	5.185	47.612

Penyebab keberhasilan IKU ini pada capaian Triwulan 4 tahun 2023 adalah:

- 1) Adanya SKP bagi setiap Penyuluh sehingga wajib menyuluh ke kelompok binaannya
- 2) Adanya Sanksi bagi Penyuluh yang tidak tercapaian nilai SKP nya
- 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP lainnya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah tersedianya database penyelenggaraan penyuluhan melalui SIMLUH KP dari aplikasi sistem pelaporan online penyuluh perikanan yang dilaporkan oleh penyuluh dalam melaporkan capaian kinerja dalam pendampingan kelompok.

adapun **upaya upaya** Puslatluh yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: membuat aplikasi SIMLATLUH KP untuk mempermudah dalam input data capaian dan pemantauan kinerja penyuluh, melakukan revisi PermenKP nomor 14 tahun 2012, melakukan video conference setiap minggu dengan para penyuluh perikanan.

Indikator Kinerja IKS.05.01

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)

IKU kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sasaran Strategis dari IKU ini adalah meningkatnya nilai ekonomi KP mendukung terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan fokus pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dimana Puslatluh KP memiliki peran strategis dalam peningkatan nilai ekonomi KP melalui peningkatan kelas kelompok utama/pelaku usaha perikanan.

Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan melalui pendekatan kelompok sehingga kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. Orientasi dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan dan meingkatkan kelas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: 1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350. 2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650. 3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000.

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 1.980 orang untuk Tahun 2023, dengan capaian Triwulan 4 Tahun 2023 sebesar 2.047 kelompok dan perbandingan dari triwulan 4 tahun 2022 sebelumnya sebesar 1.972 kelompok. Adapun perbandingan Triwulan 4 Tahun 2023 dan Tahun 2022 ada kenaikan sebesar 3,80%, dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120%, hal ini disebabkan IKU ini termasuk IKU termasuk yang dipantau dalam kegiatan Prioritas KKP dan masuk dalam IKU Level 1.

Tabel 25. Capaian IKU IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok) terhadap Renstra

SS-5			Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
IKU-10			Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target Kelompok	% Capaian
Kelompok								
9.321	1.794	1.972	1.980	2.047	103,38%	3,80%	1.500	120,00%

Tabel 26. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)

No	Saminkal	Target	Capaian	%
1	BPPP Medan	245	250	102,04
2	BPPP Tegal	265	265	100,00
3	BPPP Banyuwangi	312	312	100,00
4	BPPP Bitung	95	102	107,37
5	BPPP Ambon	83	88	106,02
6	BRPPUPP Palembang	260	271	104,23
7	BRPBATPP Bogor	130	148	113,85
8	BBRBLPP Gondol	280	297	106,07
9	BRPBAPPP Maros	310	314	101,29
Total		1.980	2.047	

Tabel 27. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)

Satminkal	Kelas kelompok		
	Madya	Utama	Total
Banyuwangi	1	1	2
BBRBLPP Gondol	264	33	297
BPPP Ambon	83	5	88
BPPP Banyuwangi	298	12	310
BPPP Bitung	99	3	102
BPPP Medan	250		250
BPPP Tegal	263	2	265
BRPBAPPP Maros	313	1	314
BRPBATPP Bogor	144	4	148
BRPPUPP Palembang	267	4	271
Grand Total	1.982	65	2.047

Penyebab Keberhasilan IKU ini dikarenakan:

1. Proses penilaian kelas kelompok mulai dari SK Kepala Dinas, Proses Penilaian ke Kelompok, Rapat Penilaian, Sampai Sertifikat Kelompok diterbitkan oleh Camat, telah dilaksanakan pada awal tahun.
2. SK Penetapannya sudah keluar disebabkan masih adanya verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah dipercepat.

adapun **Upaya Upaya** yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan Pelaku usaha, kelompok binaan, penyuluh perikanan untuk meningkatkan kenaikan kelas kelompoknya, mempermudah proses peningkatan kelas kelompok, penyuluh mendampingi proses kenaikan kelas.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.05.03 kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha KP yang dibentuk (Kelompok)

IKU terkait Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Sasaran Strategis dari IKU ini adalah mempersiapkan calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan.

IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk diukur dengan menghitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk / ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan di periode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Capaian pada tahun 2022 sebesar 4.029 kelompok dan capaian pada triwulan 4 tahun 2023 sebesar 3.758 kelompok dari target tahun 2023 sebesar 3.400 kelompok. Perbandingan capaian triwulan 4 tahun 2022 dan tahun 2023 ada penurunan sebesar - 6,73% dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120%, hal ini disebabkan adanya semakin berkurangnya pelaku usaha menjadi kelompok dan proses yang masih sulit untuk menjadi kelompok baru.

Tabel 28. Capaian IKU IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang dibentuk (Kelompok) terhadap Renstra

SS-5			Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
IKU-11			Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Kelompok	% Capaian
Kelompok								
3.542	3.613	4.029	3.400	3.758	110,53%	-6,73%	2.000	120,00%

Tabel 29. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang dibentuk (Kelompok)

No	Saminkal	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	434	499	114,98
2	BPPP TEGAL	413	450	108,96
3	BPPP BANYUWANGI	605	617	101,98
4	BPPP BITUNG	301	361	119,93
5	BPPP AMBON	190	200	105,26
6	BRPPUPP Palembang	497	554	111,47
7	BRPBATPP Bogor	290	348	120,00
8	BBRBLPP Gondol	315	368	116,83
9	BRPBAPPP Maros	355	361	101,69
Total		3.400	3.758	110,53

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
1	Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha KP yang Dibentuk (Kelompok)	3.400	3.758	110,53
	Puslatlulh	3.400	3.758	110,53

Tabel 30. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang dibentuk (Kelompok)

Satminkal	Bidang Usaha					
	Budidaya	Garam	Penangkapan	Pengawasan/konservasi	Pengolahan/Pemasaran	Grand Total
Banyuwangi	1		1			2
BBRBLPP Gondol	187	3	127	3	48	368
BPPP Ambon	59		114	1	26	200
BPPP Banyuwangi	393	5	131	10	75	614
BPPP Banyuwangi	1					1
BPPP Bitung	141		171	2	47	361
BPPP MEDAN	248	6	176	10	59	499
BPPP Tegal	286	8	101	2	53	450
BRPBAPPP Maros	184	1	126	1	49	361
BRPBATPP Bogor	241	1	55	3	48	348
BRPPUPP Palembang	313		155	3	83	554
Grand Total	2.054	24	1.157	35	488	3.758

Penyebab keberhasilan IKU ini dikarenakan:

- 1) Satminkal memberikan arahan mempercepat proses pendataan dan verifikasi penumbuhan kelompok kepada Penyuluh dan Instansi terkait
- 2) Triwulan 4 ini penyuluh berkoodinasi dengan pemerintah daerah melaksanakan pendataan dan verifikasi penilaian pelaku usaha atau pelaku utama yang menjadi kelompok baru.
- 3) Adanya aplikasi SIMLATLUH KP yang dibuat oleh Puslatluh dalam mempermudah dan melihat capaian kinerja penyuluh.

adapun **upaya upaya** yang dilakukan Puslatluh kp adalah melakukan sosialisasi permen kp nomor 14 tahun 2012 kepada penyuluh perikanan,

dinas kp dan pelaku usaha dengan melalui Vidio conference, media sosial serta eselon 1 lingkup KKP.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.05.04 Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

IKU Tenaga Kerja yang terlibat lingkup Puslatluh KP adalah Tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP, adapun capaian pada IKU ini sesuai manual IKU nya diambil dari data Jumlah PPB, Jumlah PPS, Jumlah Pengelola UMKM, dan Jumlah P2MKP dengan target tahun 2023 sebesar 12.342 orang (101,43%), Pengukuran IKU ini dilakukan secara Tahunan. Adapun progres capaian sampai dengan Triwulan 4 sebanyak 12.519 orang yang diambil dari database Penyuluh Perikanan Bantu serta UMKM.

Tabel 31. Capaian IKU Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP terhadap Renstra

SS-5		Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
IKU-12		Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023					
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
Orang							Orang	
0	0	15.221	12.342	12.519	101,43	-17,75%	-	

Perbandingan dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 17,75%, hal ini disebabkan adanya penurunan target tahunannya dan semakin sulitnya memenuhi capaian dengan bukti foto geotagging, adapun

Tabel 31. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang dibentuk (Kelompok)

No	Level 2	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	1.744	1.744	100,00
2	BPPP TEGAL	2.064	2.064	100,00
3	BPPP BANYUWANGI	1.930	1.939	100,47
4	BPPP BITUNG	1.061	1.070	100,85
5	BPPP AMBON	348	394	113,22
6	BRPPUPP Palembang	1.068	1.079	101,03
7	BRPBATPP Bogor	889	921	103,60
8	BBRBLPP Gondol	1.956	2.026	103,58
9	BRPBAPPP Maros	1.282	1.282	100,00
Total		12.342	12.519	101,43

Tabel 32. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang dibentuk (Kelompok)

Satminkal	Jenis Tenaga Kerja			
	P2MKP	PPB	UMKM	Total
BBRBLPP Gondol		159	1.867	2.026
BPPP Ambon		92	302	394
BPPP BANYUWANGI	2	170	1.767	1.939
BPPP Bitung	8	101	961	1.070
BPPP MEDAN	12	204	1.528	1.744
BPPP TEGAL	23	184	1.857	2.064
BRPBAPPP Maros		147	1.135	1.282
BRPBATPP Bogor		160	761	921
BRPPUPP Palembang		163	916	1.079
Total	45	1.380	11.094	12.519

Penyebab keberhasilan IKU ini dikarenakan:

- 1) Penyuluh melaksanakan proses pendataan dan verifikasi tenaga kerja yang terlibat di KKP dengan bukti foto aktivitas goetagging

- 2) Triwulan 4 ini penyuluh berkoordinasi dengan pemerintah daerah melaksanakan pendataan dan verifikasi penilaian pelaku usaha atau pelaku utama yang menjadi kelompok baru.
- 3) Adanya aplikasi SIMLATLUH KP yang dibuat oleh Puslatluh dalam mempermudah dan melihat capaian kinerja penyuluh.

Upaya Upaya yang dilakukan adalah : melakukan sosialisasi dengan penyuluh perikanan untuk setiap aktivitas kinerja dengan melampirkan data dukung foto geotagging, membuat profil kelompok perikanan yang disuluh, membuat SK Kepala Badan BPPSDMKP menugaskan penyuluh di wilayah kerja penyuluhan.

Sasaran Program SK.06 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.06.01

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)

Penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Faktanya sampai saat ini khususnya kegiatan hilirisasi teknologi kepada pengguna masih belum optimal. Untuk itu, dibutuhkan kegiatan hilirisasi Iptek untuk mengubah perilaku serta pemanfaatan inovasi teknologi oleh masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk. Ditambah lagi hasil riset yang dihasilkan harus bisa disampaikan dan diterapkan oleh masyarakat. Beberapa jenis kegiatan riset yang dilakukan, mulai dari kegiatan yang bersifat responsif, antisipatif, hingga yang bersifat rekomendasi. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan hasil riset perlu suatu kegiatan diseminasi yang dapat secara luas berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat dan

penyediaan lapangan kerja BRSDMKP memberikan solusi untuk menerobos tantangan tersebut dengan mengkolaborasikan kegiatan riset dan SDM melalui program Desa Inovasi. Program ini mendorong pemangku kepentingan desa untuk membangun budaya inovasi berbasis kelautan dan perikanan dalam mengelola sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi bersandar sebatas eksploitasi sumberdaya, tapi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya berbasis iptek. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program, hasil karya para peneliti BRSDMKP akan diramu oleh instruktur, widyaiswara, penyuluh, dosen, dan stakeholder terkait agar dapat mudah diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan hilirasi paket teknologi dalam rangka mengintroduksi paket teknologi kelautan dan perikanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Desa Inovasi dilakukan secara partisipatif antar Satuan Kerja lingkup BRSDMKP, eselon I lingkup KKP, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat dengan harapan teknologi-teknologi hasil riset BRSDMKP tepat guna sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta petambak garam. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 9 Desa Inovasi sedangkan untuk realisasinya adalah tahunan,kenaikan sebesar 100% dari tahun 2022 dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120%.

Tabel 33. Capaian IKU Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) terhadap Renstra

SS-6				Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP					
IKU-13				Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (paket)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024		
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Desa Perikanan Cerdas	% Capaian	
Desa Perikanan Cerdas									
5	6	5	9	9	100,00%	80,00%	5	120,00%	

Keluaran yang diharapkan dari program Desa Inovasi riset dan SDM kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut;

1. Terdiseminaskannya teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset BRSDMKP kepada *stakeholder* di desa.
2. Memberikan masukan penetapan kebijakan riset dan SDM dari umpan balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna.
3. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat KP

Tabel 34. Rekap IKU IKU Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)

No	Saminkal	Target	Realisasi	%
1	BPPP Tegal	2	2	100,00
5	BPPP AMBON	1	1	100,00
6	BRPPUPP Palembang	2	2	100,00
7	BRPBATPP Bogor	1	1	100,00
8	BBRBLPP Gondol	1	1	100,00
9	BRPBAPPP Maros	2	2	100,00
	Total	9	9	100,00

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah:

- 1) Adanya Kerjasama dengan Pemda setempat dalam penggunaan dana desa;
- 2) Adanya CSR dalam membangun desa menjadi desa inovasi;
- 3) Komitmen masyarakat desa dalam memajukan desanya;
- 4) serta peran serta penyuluh perikanan.

Upaya Upaya yang dikerjakan dari program Desa Inovasi riset dan SDM kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut;

1. adanya Iptek untuk kebutuhan masyarakat (desa) dengan kerjasama dengan Telkom
2. dimanfaatkannya Iptek untuk meningkatkan produktifitas masyarakat (desa) dengan kerjasama NGO
3. Terjalannya interaksi antara dunia Iptek (R&D) dengan dunia usaha/bisnis di masyarakat (desa)
4. Terwujudnya produk unggulan spesifik desa (daerah) yang berkualitas

Sasaran Program SK.06 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.06.02

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)

IKU ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan dan perikanan tepat guna. Penghitungan dilakukan mengidentifikasi jumlah percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan 4 tahun 2023 sudah selesai kegiatan lokasi unit percontohan penyuluhan KP dan untuk progress

capaiannya mencapai 100%. Berikut adalah sebaran Lokasi percontohan penyuluhan dan komoditasnya di 9 Balai/Satminkal untuk 2023.

Target pada IKU ini sebesar 21 unit percontohan pada tahun 2023. Pada IKU ini dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 80% , dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120%.

Tabel 35. Capaian IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok) terhadap Renstra

SS-6		Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP						
IKU-14		Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024 Kelompok	% Capaian
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023		
Kelompok			21	21	100,00	5,00%	50	42,00%
13	9	20	21	21	100,00	5,00%	50	42,00%

Tabel 36. Rekap IKU IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)

No	Saminkal	Target	Realisasi	%
1	BPPP MEDAN	1	1	100,00
3	BPPP BANYUWANGI	1	1	100,00
4	BPPP BITUNG	1	1	100,00
5	BPPP AMBON	1	1	100,00
6	BRPPUPP Palembang	2	2	100,00
7	BRPBATPP Bogor	4	4	100,00
8	BBRBLPP Gondol	3	3	100,00
9	BRPBAPPP Maros	8	8	100,00
Total		21	21	100,00

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah:

- 1) Adanya Kerjasama dengan Pemda setempat dalam penggunaan dana desa;
- 2) Adanya CSR dalam membangun desa menjadi desa inovasi;

- 3) Komitmen masyarakat desa dalam memajukan desanya;
- 4) serta peran serta penyuluh perikanan.

Upaya Upaya yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi kepada penyuluh perikanan tata cara mengadakan kegiatan unit percontohan kepada kelompok perikanan perihal lokasi unit percontohan, dsb.

Sasaran Program SK.07 **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja IKS.07.01 **Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)**

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif.

Capaian pengukurannya Tahunan tapi saat ini sudah ada progres sebesar 100% dengan kekurangan masoh proses BAST. dengan keberhasilan Prasarana di UPt telah dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan kp. capaian seebstar 10 unit dan dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada kenaikan dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 83,33%

Tabel 37. Capaian IKU Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) terhadap Renstra

SS-7			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar					
IKU-15			Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024 Unit	% Capaian
Unit								
-	8	10	10	10	100	0,00%	12	83,33%

Tabel 38. Rekap IKU Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)

No	SATKER	Target	Capaian
1	BPPP Medan	1	1
2	BPPP Tegal	2	2
3	BPPP Banyuwangi	1	1
4	BPPP Bitung	2	2
5	BPPP Ambon	1	1
6	BRPPUPP Palembang	1	1
7	BRPBATPP Bogor	1	1
8	BBRBLPP Gondol	1	1
Total		10	10

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10	10
	Puslatluh KP	10	10

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah : pemanfaatan aset untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan kp, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, adanya komitmen pimpinan dalam memenuhi pelayanan minimal sarana dan prasarana satker.

dengan **upaya upaya** yang telah dilakukan adalah: melaksanakan lelang/tender secara terbuka dengan di upload ke SPSE KKP dan berkoordinasi dengan Pokja PBJ KKP, adanya bimtek/sosialisasi peraturan terbaru aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sasaran Program SK.07 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.07.02

Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif.

Untuk Tahun 2023 IKU ini ada dilokasi BPPP Ambon , BPPP Banyuwangi, BPPP Medan, BPPP Bitung, BDA Sukamandi dan BPPP Tegal. Saat ini sudah selesai pekerjaanya oleh pihak ketiga. Capaian pengukurannya Tahunan tapi saat ini sudah ada progres sebesar 100% dengan bukti BAST. Capaian sebesar 5 unit dan dibandingkan dengan tahun 2022 ada kenaikan sebesar 120% dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 41,67%, dengan keberhasilan yang dilakukan bahwa Prasarana di UPt telah dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan kp.

Tabel 38. Capaian IKU Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) terhadap Renstra

SS-7			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar					
IKU-16			Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	% Capaian
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023		
Unit			Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
-	7	2	5	5	1,00	120%	12	41,67%

Tabel 39. Rekap IKU IKU Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)

No	SATKER	Target	Capaian
1	BPPP Medan	1	1
2	BPPP Tegal	1	1
3	BPPP Banyuwangi	1	1
4	BPPP Ambon	1	1
5	BRPPUPP Palembang	1	1
Total		5	5

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah : pemanfaatan aset untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan kp, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, adanya komitmen pimpinan dalam memenuhi pelayanan minimal sarana dan prasarana satker.

dengan **upaya upaya** yang telah dilakukan adalah: melaksanakan lelang/tender secara terbuka dengan di upload ke SPSE KKP dan berkoordinasi dengan Pokja PBJ KKP, adanya bimtek/sosialisasi peraturan terbaru aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Indikator Kinerja IKS.08.01 Aparatur KP yang dilatih (orang)

IKU untuk Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya

melalui Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi, maupun oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan memiliki peran strategis dalam pencapaian IKU tersebut.

Tabel 40. Capaian IKU Aparatur KP yang dilatih (orang) terhadap Renstra

SS-8		Aparatur yang Dididik dan Dilatih						
IKU-17		Aparatur KP yang dilatih						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Orang	% Capaian
Orang								
8.676	4.986	5.530	4.960	5.716	115,2%	3,36%	5.000	114,32%

Perbandingan Triwulan 4 tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah berbeda jauh capaiannya yaitu ada kenaikan pada Triwulan 4 tahun 2022 sebesar 115,2%. artinya adanya terobosan dalam diklat bagi ASN KKP dengan mewajibkan semua ASN KKP memenuhi pelatihan setiap tahunnya 20Jp. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 115,24%

Tabel 41. Rekap IKU IKU Aparatur KP yang dilatih (orang)

No.	KEGIATAN	Target	Capaian	%
1	Aparatur KP yang dilatih dengan metode Blended (orang)	760	906	119,21
2	Aparatur KP yang dilatih dengan metode Full online (orang)	4.200	4.810	114,52
Total		4.960	5.716	5.716

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
1	Aparatur KP yang dilatih (Kelompok)	4.960	5.716	115,24
	Puslatluh	4.960	5.716	115,24

Capaian positif IKU ini antara lain disebabkan oleh:

1. Pelatihan melalui aplikasi aplikasi e-milea sehingga bisa online ke semua ASN KKP
2. Eselon I Teknis pada awal tahun sudah berkoordinasi dengan BDA Sukamandi mengenai Diklat Teknis yang akan dilaksanakan
3. Tersedianya sarana pokok dan penunjang penyelenggaraan diklat,
4. Widyaiswara yang telah memiliki sertifikat ToT sesuai bidang diklat yang dilatihkan, dan tersedianya perangkat kurikulum dan modul pelatihan, serta telah terakreditasinya program diklat kepemimpinan tingkat III dan IV, serta diklat prajabatan di BDA Sukamandi oleh LAN-RI.

Upaya Upaya yang dilakukan dalam Peningkatan kompetensi ASN KP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 4.960 Pegawai ASN KP mengikuti pelatihan, baik pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan maupun pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, seperti Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial dengan melakukan kerjasama dan sinkronisasi dengan Eselon 1 KKP dalam Identifikasi kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.01

Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah jejaring dan atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan maupun UPT Pelatihan dan Penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah

disepakati terkait kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati dalam bentuk Kepmen, SK, MOU, dan atau KAK yang sudah di tandatangi.

IKU dari sasaran strategis terselenggaranya kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan ini menggambarkan inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Puslatluh KP yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan, dan sebagai upaya lanjutan dari output yang telah dihasilkan untuk menjadi *input* pada proses selanjutnya.

Tabel 42. Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen) terhadap Renstra

SS-9			Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
IKU-18			Jumlah Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (kesepakatan)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Kesepakatan	% Capaian
Kesepakatan							Kesepakatan	
5	13	14	10	16	120	14,29%	8	120,00%

Pada triwulan 4 tahun 2023 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Puslatluh KP sudah ada capaian 10 MOU dari Target triwulan 4 tahun 2023 sebesar 16 MOU dan dibandingkan dengan tahun 2022 adanya kenaikan sebesar 14,29%. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120%

Tabel 43. Rekap IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

No	KERJASAMA	Judul Kerjasama	Nomor perjanjian kerjasama	JANGKA WAKTU	
				MULAI	BERAKHIR
1	BPPP Tegal - PT. NEW COMER	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL	7/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	24 Januari 2023	24 Januari 2026
2	BPPP Tegal - CV. Local Maritim	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL	2/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	24 Januari 2023	24 Januari 2026
3	BPPP Tegal - Jangkar Karat Maritim Center	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL	13/BRSDM/KKP/PKS/III/2023	21 Maret 2023	21 Maret 2026
4	BPPP Tegal - SMK Yamipura	PELATIHAN, PEMAGANGAN SERTA SERTIFIKASI GURU DAN SISWA	9/BRSDM/KKP/PKS/III/2023	20 Maret 2023	20 Maret 2026
5	BPPP Tegal SMK - Muhammadiyah Tuban	PELATIHAN, PEMAGANGAN, SERTA SERTIFIKASI GURU DAN SISWA/I	21/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023	5 April 2023	5 April 2026
6	BPPP Tegal - SMK SUPM Al Maarif	Pelatihan, Pemagangan serta Sertifikasi Guru dan Siswa	25/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023	5 April 2023	5 April 2026
7	BPPP Banyuwangi - SMKN 1 Watulimo Trenggalek	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KEPELAUTAN DAN PERIKANAN	14/ BRSDM / KKP/ PKS/ II /2023	5 Februari 2023	5 Februari 2026
8	BPPP Banyuwangi - Universitas Hang Tuah Surabaya	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	22/BRSDM/KKP/PKS/V/2023	22 Mei 2023	22 Mei 2026
9	BPPP Banyuwangi - DKP Kutai Kartanegara	PELATIHAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PELAKU UTAMA PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	27/BRSDM/KKP/PKS/V/2023	22 Mei 2023	22 Mei 2026
10	BPPP Tegal - PT Sirip Biru Nusantara	PEMANFAATAN ASET TANAH DAN GEDUNG BANGUNAN SERTA ASET	23/BRSDM/KKP/PKS/VI/2023	7 Juni 2023	7 Juni 2028
11	BPPP Tegal - SMK Negeri 4	PELATIHAN PEMAGANGAN SERTA SERTIFIKASI GURU DAN SISWA	33/BRSDM/KKP/PKS/IVI/2023	5 April 2023	5 April 2026
12	BPPP Tegal - SMK Negeri 1 Giritontro	PELATIHAN PEMAGANGAN SERTA SERTIFIKASI GURU DAN SISWA	32/BRSDM/KKP/PKS/IVI/2023	21 Juli 2023	21 Juli 2025
13	BPPP Tegal - PUSAT PELATIHAN MANDIRI KEPELAUTAN DAN PERIKANAN (P2MKP) LEMBAGA KEMARITIMAN DAN NELAYAN PATI (LKNP)	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL	115/LKNP/VII/P2M KP-LKNP/2023	21 Juli 2023	21 Juli 2026
14	BPPP Tegal - FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO	PELATIHAN, PEMAGANGAN SERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA DAN DOSEN	38/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2023	21 Agustus 2023	21 Agustus 2026
15	BPPP Tegal - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 2 MERTOYUDAN	PELATIHAN, PEMAGANGAN, SERTA SERTIFIKASI GURU DAN SISWA/I	40/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2023	31 Agustus 2023	31 Agustus 2026

No	KERJASAMA	Judul Kerjasama	Nomor perjanjian kerjasama	JANGKA WAKTU	
				MULAI	BERAKHIR
16	BPPP Tegal - PT. KTJ INDONESIA	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL PERIKANAN	45/BRSDM/KKP/PKS /IX/2023	18 September 2023	18 September 2026

Capaian keberhasilan IKU ini antara lain disebabkan oleh:

1. Kerjasama dengan Intansi terkait lainnya, Pemerintah daerah dan NGO pada awal tahun ;
2. Pemenuhan SDM Tenaga Pelatih;
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelatihan.

Upaya yang telah dilakukan adalah; adanya MOU kerjasama dengan BNSP, Kementranker, Perlaut, LSP KP, JICA sehingga adanya MOU dan kegiatan yg dibiayai oleh mereka.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.02 Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru. Definisinya adalah Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Formula indikator kinerja ini A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen

hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. Presentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan.

Tabel 44. Capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%) terhadap Renstra

SS-9			Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
IKU-19			Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
			%					
100	100	100	100	100	100,00	0,00%	100	100,00%

Pada tabel diatas dapat dijabarkan untuk bukti capaian diperoleh Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker. Pada tahun 2023 triwulan 4 ini capaiannya sebesar 100% dari target Triwulan 4 sebesar 100%. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 100%.

Tabel 45. Rekap IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)

No	JENIS LAYANAN	Jumlah	Target Tw 4	Realisasi dokumen
1	Laporan Rapat Koordinasi Puslatluh	2	2	2
2	Laporan Renja dan Renstra	3	3	3
3	Laporan Rumusan pelatihan dan penyuluhan	4	4	4
4	Laporan Realisasi anggaran dan RKAKL	12	12	12
5	Laporan SPIP dan MR	4	4	4
6	Laporan BMN (Pengajuan Lelang dan Penghapusan)	2	2	2
7	Laporan Bulanan	12	12	12
8	Wekly Report	46	46	46
9	Laporan Tahunan 2022	1	1	1
10	Laporan Program dan Kegiatan LKJ	4	4	4
11	Laporan LHE SAKIP dan WBK	1	1	1
12	Laporan Simlat	1	1	1
13	Laporan Evaluasi Rencana Aksi dan Rencana Aksi	4	4	4
		96	96	96,00

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	100,00
	Puslatluh KP	100	100,00

Faktor Keberhasilan kegiatan ini yaitu:

- 1) Adanya SKP Pegawai yang membutuhkan data dukung dalam penilaian SKP Pegawai
- 2) Komitmen Pimpinan dalam menyelesaikan laporan laporan sebagai data dukung SKP.

Upaya Upaya yang dilakukan pada IKU ini adalah:

- 1) Adanya SKP Pegawai sehingga semua pegawai wajib memenuhi output kegiatannya
- 2) Komitmen Pegawai dan Pimpinan dalam pemenuhan output kegiatan.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.03

Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan

Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Kegiatan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap Tahunnya dilaksanakan dan untuk Tahun 2023 satker **BPPP Ambon** sebagai satker yang akan dinilai.

IKU yang di tetapkan pada PK Tahun 2023 menggunakan metode pengukuran tahunan, perbandingan dengan tahun sebelumnya untuk capaiannya sama yaitu 1 satker. Capaian tahun ini sama dengan capaian tahun 2022 sebesar 1 satker atau tidak ada kenaikan dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 100%.

Tabel 46. Capaian IKU Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker) terhadap Renstra

SS-9		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKU-20		Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target Satker	% Capaian
Satker								
-	1	1	1	1	100,00	0,00%	1	100,00%

Tabel 47. Rekap IKU Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)

No	Satker WBK	Tahun Ditetapkan	Nomor Sertifikat/Nomor Surat Penetapan
1	BPPP Ambon	2023	B.1747/MEN-KP/XI/2023
Total		1	1

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen semua pegawai satker untuk menjadi satker WBK dengan berkoordinasi dengan Itjen KKP, BPPSDMKP dan Puslatluh.

Upaya upaya yg sudah dilakukan yaitu : melakukan sosialisasi WBK kepada semua pegawai, melakukan koordinasi dengan Sesbadan, Itjen, Puslatluh KP.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.04
Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. IKU yang di tetapkan pada PK Tahun 2023 menggunakan metode pengukuran Tahunan, perbandingan dengan tahun sebelumnya juga sama untuk capaiannya 1 satker. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 100%.

Tabel 46. Capaian IKU Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker) terhadap Renstra

SS-9		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKU-21		Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target Satker	% Capaian
Satker								
-	1	1	1	1	100,00	0,00%	1	100,00%

Kegiatan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap Tahunnya dilaksanakan dan untuk Tahun 2023 **satker BPPP Bitung** sebagai satker yang dilakukan pendampingan dan diusulkan.

Tabel 47. Rekap IKU Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)

No	Satker WBK	Tahun Ditetapkan	Nomor Sertifikat/Nomor Surat Penetapan
1	BPPP Bitung	2023	B.118/ITJ.1/HP.660/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023
Total		1	1

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen semua pegawai satker untuk menjadi satker WBK dengan berkoordinasi dengan Itjen KKP, BPPSDMKP dan Puslatluh.

Upaya upaya yg sudah dilakukan yaitu : melakukan sosialisasi WBK kepada semua pegawai, melakukan kordinasi dengan Sesbadan, Itjen, Puslatluh KP.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.05

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP

IKU ini Nilai rekonsiliasi kinerja Puslatluh KP merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

Capaian IKU ini adalah sebesar 94,63 dari target sebesar 93%, adapun Perbandingan capaian IKU ini dengan IKU tahun 2022 sebesar 101,75% dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 118,29%,

Tabel 48. Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP terhadap Renstra

SS-9		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKU-22		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Nilai	% Capaian
Nilai								
-	98,00	98,24	93	94,63	101,75	-3,67%	80	118,29%

Tabel 49. Rekap Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP

	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	97,77	86,90	113,86	100,00
Skor dikali Bobot	24,44	21,73	28,47	20,00
Total Skor	94,63			

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah: komitmen pimpinan dan pegawai dalam menyelesaikan dan menyusun laporan kinerja, data capaian dan dokumen perencanaan rapih dan selaras.

adapun **upaya** yg dilakukan adalah : menyusun dan menyimpan dokumen kinerja dengan rapi dan terstruktur sehingga dalam penyusunan dokumen bisa terisi semuanya.

**Sasaran Program SK.09
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

Indikator Kinerja IKS.09.06

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP

Indikator Kinerja Utama ini Persentase unit kerja Puslatluh KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar belum mencapai target 92% capaian yang dicapai hanya mendapatkan 100% untuk Puslatluh KP dan dari target Triwulan 3 tahun 2023 dengan upaya yg dilakukan adalah mewajibkan semua pegawai *input* berita ke dalam aplikasi Cofis KKP.

Tabel 50. Capaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP (%) terhadap Renstra

SS-9								
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker								
IKU-23								
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP (%)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023					
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
			%					
100	100	100	92	116,58	120	16,58%	90	120,00%

Perbandingan IKU ini dengan Tahun 2022 sebesar 126,72% disebabkan adanya perbedaan aplikasi yang dipergunakan oleh user yang sebelumnya menggunakan aplikasi Bitrix24.kkp menjadi aplikasi cofis.kkp sehingga ada perbedaan perhitungannya.

Tabel 51. Rekap IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP (%) terhadap Renstra

No	Komponen	Target	Capaian Tw 3	%
1	Dokumen	18,40	20,00	100,00
2	Keaktifan	73,60	80,00	100,00
	Total	92,00	100	100

Perbandingan dengan IKU tahun sebelumnya yaitu untuk triwulan 4 yaitu sebesar 100%. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120%, Permasalahan pada IKU ini disebabkan sebagai berikut:

1. Adanya kekosongan jabatan pada eselon III sehingga harus membuat akun baru pengganti jabatan sementara (Plt) pada aplikasi CofisKkp;
2. Ada Revisi PK Puslatluh dan UPT;

3. *Input data ke dalam aplikasi CofisKKP harus memuat unsur 5W1H;*
4. *Penilaian IKU MP menggunakan aplikasi ini belum baku.*

Upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian IKU ini adalah : Adanya bimtek aplikasi cofish yang dilaksanakan oleh Pusdatin KKP setiap minggu dan adanya *helsdesk* penginputan berita sehingga mempermudah dalam input berita.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.07 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)

IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP terdiri dari indeks kualifikasi Pendidikan ASN, indeks kompetensi ASN, indeks kinerja ASN, dan indeks disiplin ASN KKP. Capaian IKU ini belum dilakukan pengukuran oleh Eselon I KKP pada semester 2 tahun 2023 dengan capaian 88,61 dengan kenaikan dari tahun 2022 sebesar 3,54%. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 116,59%.

Tabel 51. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks) terhadap Renstra

SS-9		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKU-24		Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	% Capaian
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023		
Indeks							Indeks	
74,39	85,58	85,58	77	88,61	115,08	3,54%	76	116,59%

Tabel 52. Rekap IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)

No	Komponen	Bobot	Indeks Profesionalitas (IP)	Prosentase (%)
1	Kualifikasi	25,00	22,06	88,24
2	Kompetensi	40,00	36,82	92,05
3	Kinerja	30,00	25,30	84,33
4	Disiplin	5,00	5	100,00

Upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian IKU ini adalah : Adanya bimtek yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi dengan jadwal setiap minggu dan kewajiban semua pegawai mempunyai output di SKP.

**Sasaran Program SK.09
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

**Indikator Kinerja IKSK.09.08
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)**

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari pada itu, penting untuk menjaga pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

Pada tahun 2023, dari target IKU sebesar 0,5 untuk capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yaitu 0. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 120%.

Tabel 53. Capaian IKU Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%) terhadap Renstra

SS-9		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKU-25		Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh (%)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023				Target 2024	
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	%	% Capaian
%			0,5	0	120,00		100	120,00%

Tabel 54. Rekap IKU Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)

No	Satker	Realisasi Anggaran Tahun 2019	Nilai Temuan	%
1	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	0,5	0	100
Total		-	-	

Upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian IKU ini adalah : Tertib administrasi dengan adanya pedoman/panduan pertanggungjawaban keuangan .

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.09 Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

Pada tahun 2023, dari target IKU sebesar 80%, untuk capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 80%. dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 100%.

Tabel 55. Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%) terhadap Renstra

SS-9			Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
IKU-26			Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Puslatluh KP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)					
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023					
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
%							%	
100	100	100	80	80	100,00	-20,00%	80	100,00%

Tabel 56. Rekap IKU Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)

No	Level 2	Rekomendasi	TL	%
1	Puslatluh KP	80	80	100,00
Total		80	80	100,00

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Puslatluh KP	80	80

Faktor Keberhasilan IKU ini adalah : adanya komitmen manajemen Puslatluh dalam mengelola administrasi keuangan secara *good government* dengan pembukuan laporan keuangan yang rapih.

Upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian IKU ini adalah : Adanya tertib administrasi pembukuan laporan keuangan.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.10 Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*).

Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah d.h.i KKP dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup BRSDMKP Tahun 2023 tersebut bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB Tahun 2023 lingkup BRSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen

pelaksanaan RB BRSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 26 Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB KKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup KKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker terkait, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB. Dalam rangka PMPRB tersebut, Inspektorat Jenderal KKP perlu menilai kesesuaian pemenuhan dokumen dengan matriks penilaian mandiri (self assessment).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup KKP Tahun 2023 bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB TA 2023 lingkup BRSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BRSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 30 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB BRSDMKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup BRSDMKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker lingkup BRSDMKP, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB.

Tabel 57. Capaian IKU Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit) terhadap Renstra

SS-9		Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan						
IKU-27		Unit Kerja Lingkup Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023					
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
Unit							Target 2024	% Capaian
Unit							Unit	
0	0	1	1,00	1,00	100,00	0,00%		

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023 yaitu **BPPP Ambon** yang pengukurannya Tahunan, adapun capaian pada IKU ini sesuai manual IKU nya diambil dari Penilaian LHE PMPRB . faktor keberhasilan adalah dibuatkan aplikasi sebagai bentuk inovasi di BPPP Ambon dalam mempercepat pelayan publik. capaian sebesar 1 satker sama dengan tahun 2022, dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 tidak bisa dibandingkan karena tidak ada target di tahun 2024.

Tabel 58. Rekap IKU Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)

No	Komponen	Target	Capaian	%
1	BPPP Ambon	1	1	100,00
	Total	1	1	100,00

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.11 Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023, dan pengukuran capainnya menggunakan Tahunan.

Sebagaimana kita ketahui Bersama, berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP (saat ini Permen KP dimaksud dalam proses review), tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan. (apakah berhasil ataukah gagal).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, salah satu pengendalian dan fasilitasi dalam pengelolaan kinerja dalam adalah dalam bentuk Advisory Services (pendampingan dalam rangka perbaikan kinerja). Salah satu bentuk implemementasi di BRSDM berupa inisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekon kinerja pada seluruh satker secara berjenjang yang dilakukan BRSDM, mulai diadopsi untuk lingkup KKP. Begitupula evaluasi berbasis aplikasi menjadi nilai inovasi bagi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP, menjadikan BRSDM mendapatkan nilai lebih dalam pengelolaan kinerja.

Tabel 59. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai) terhadap Renstra

SS-9		Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan						
IKU-27		Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)						
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023					
			Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian
Nilai							Nilai	
0	0	-	80,00	81,80	102,25			

Sebagai informasi nilai SAKIP BRSDM KP Tahun 2023 adalah pengukurannya metode tahunan walau sudah ada penilaian mandiri lingkup BRSDMKP

dengan Nilai 81,80 dan Uji Petik oleh Itjen KKP , tidak dapat dibandingkan karena IKU Baru dan dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2024 tidak bisa dibandingkan, faktor keberhasilannya : DOKumen yang dibutuhkan masih tersimpat dalam Gdrive selama 5 tahun sehingga mempermudah pengisian data SAKIP.

3. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan Anggaran Lingkup Puslatluh KP Sampai dengan triwulan 4 tahun 2023, Puslatluh KP melaksanakan DIPA TA. 2023 dengan total anggaran Lingkup Puslatluh KP sebesar Rp.662.447.185.000,- dan Pagu Puslatluh KP sebesar Rp. 14.971.385.000,-. Adapun Realisasi sampai dengan 06 Oktober 2023 tahun anggaran 2023 adalah realisasi anggaran pada DIPA Lingkup Puslatluh KP Rp. 64.5487.479.263,- (97,55%) dan Realisasi Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 14.452.071.544 (99,48 %).

Tabel 60. Capaian Realisasi Keuangan Puslatluh KP

NO	SATKER	JUMLAH		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%-ase
1	PUSLATLUH	14.527.385.000	14.452.071.544	99,48%
2	BDA Sukamandi	15.703.761.000	15.664.110.888	99,75%
3	BPPP MEDAN	74.673.742.000	73.994.068.315	99,09%
4	BPPP TEGAL	98.433.429.000	93.877.350.822	95,37%
5	BPPP BANYUWANGI	91.978.208.000	87.858.703.363	95,52%
6	BPPP BITUNG	56.607.073.000	55.757.229.947	98,50%
7	BPPP AMBON	64.088.392.000	62.689.178.504	97,82%
8	BRPPUPP Palembang	63.862.321.000	62.962.836.406	98,59%
9	BRPBATPP Bogor	38.435.518.000	37.484.146.883	97,52%
10	BBRBLPP Gondol	58.177.396.000		96,60%

NO	SATKER	JUMLAH		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%-ase
			56.201.658.286	
11	BRPBAPPP Maros	85.190.684.000	84.546.124.305	99,24%
	TOTAL	661.677.909.000	645.487.479.263	97,55%

Sementara jika dilihat dari anggaran berdasarkan pagu di Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, dimana kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP merupakan gabungan dari kinerja satuan pelatihan dan penyuluhan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pelatihan dan penyuluhan KP. Tabel berikut menggambarkan realisasi per sasaran strategis bidang pelatihan dan penyuluhan KP Tahun 2023:

Secara umum kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

- a) Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
- b) Anggaran yang masih bergerak dinamis dimana prioritas pelaksanaan kegiatan masih terfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemik Covid 19 yang masih berlangsung di tahun 2023 ini;
- c) Untuk penghematan anggaran, memantau dan memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan dalam renja tetap sejalan

4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Puslatluh Kp

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Tabel 61. Capaian Realisasi Anggaran per IKU Puslatluh KP

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN			KINERJA (%)	EFFISIENSI (%)
				TARGET	REALISASI	%		
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	29.500.036.000	26.091.661.280	88,45%	106,13	17,68
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)					
		3	Nilai PNBPSatker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)					
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	792.900.000	451.212.250	56,91%	103,60	46,69
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	1.017.156.000	817.084.238	80,33%	110,00	29,67
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)					

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN			KINERJA (%)	EFFISIENSI (%)
				TARGET	REALISASI	%		
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	2.030.000.000	2.027.509.520	99,86%	100,00	0,14
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)					
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok) Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	76.945.521.000	75.231.975.850	97,77%	101,30	3,53
		10	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)					

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN			KINERJA (%)	EFFISIENSI (%)
				TARGET	REALISASI	%		
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)					
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)*	12.971.280.000	11.469.179.019	88,42%	100,00	11,58
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)					
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)					
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)					

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN			KINERJA (%)	EFFISIENSI (%)
				TARGET	REALISASI	%		
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	3.621.087.000	3.615.486.696	99,845	115,24	15,40
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12.497.385.000	12.424.562.024	99,51%	111,50	11,99
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)					
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)					
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan					

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN			KINERJA (%)	EFFISIENSI (%)
				TARGET	REALISASI	%		
			menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)					
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)					
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)					
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)					
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)					

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN			KINERJA (%)	EFFISIENSI (%)
				TARGET	REALISASI	%		
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)					
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik					
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)					

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi maka dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimum nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimum adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin efisiensinya mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dengan menggunakan rumus diatas, didapatkan angka efisiensi **Puslatluh** pada tahun 2023 sebesar 17,09 atau dengan arti Nilai Efisiensi Kinerja anggaran Puslatluh KP sebesar 92,71% yang dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Puslatluh KP masuk dalam kategori **Baik**.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai **efisiensi anggaran** pada Puslatluh KP yaitu;

1. **Perencanaan (Anggaran)**

Efisiensi anggaran dilakukan Puslatluh KP dalam beberapa dimensi, yaitu:

Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 Puslatluh KP telah menetapkan kegiatan prioritas, yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai serta melaksanakan kegiatan yg menggunakan blended dilaksanakan dengan online sehingga menghemat anggaran.

Dimensi efisiensi ketiga berupa melakukan Kerjasama dengan Instansi lain K/L, NGO, Pihak Swasta dalam menghemat penggunaan anggaran kegiatan pelatihan dan penyuluhan kp.

Dimensi efisiensi keempat berupa refofusing anggaran pada pemangkasan alokasi anggaran belanja modal, perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Dukungan Puslatluh KP dalam pencapaian upaya dimaksud dengan melakukan reuiu penganggaran secara berjenjang yang melibatkan *stakeholder* meliputi reuiu anggaran tingkat Puslatluh KP, reuiu anggaran tingkat KKP (Itjen dan Setjen), dan reuiu K/L (DJA dan Bappenas).

2. Pelaksanaan Kegiatan

Strategi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan serapan anggaran terutama untuk perjalanan dinas

- Sinergitas pelaksanaan kegiatan antar satker dan pusat dalam satu rangkaian
- Mengutamakan pertemuan di ruang rapat internal atau satker-satker Puslatluh KP
- Mengutamakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan metode online
- Sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui *video conference* dan *live streaming*
- Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan atasan berbasis *Balance Score Card* dan SKP.
- Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
- Mengadakan Pelatihan masyarakat dan aparatur dengan via Daring/online sehingga menghemat anggaran.
- Penguatan SDM Puslatluh dan UPT dalam meningkatkan kompetensi dan skill nya

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran satker lingkup Puslatluh agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang-undangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, E-Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, Simlat, e-pelaporan, serta Dashboard dan *Weekly Report* BRSDM
- Melaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan Puslatluh Kp dengan virtual. Hal tersebut memangkas perjalanan dinas dan pertemuan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan
- Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

Permasalahan

1. Banyak Realisasi Data Capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan sedangkan realisasi keuangannya tidak sampai 100%, sehingga menjadi analisa bahwa kegiatan tersebut tidak membutuhkan biaya yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan anggaran sebagian satker masih belum **tertib administrasi**.

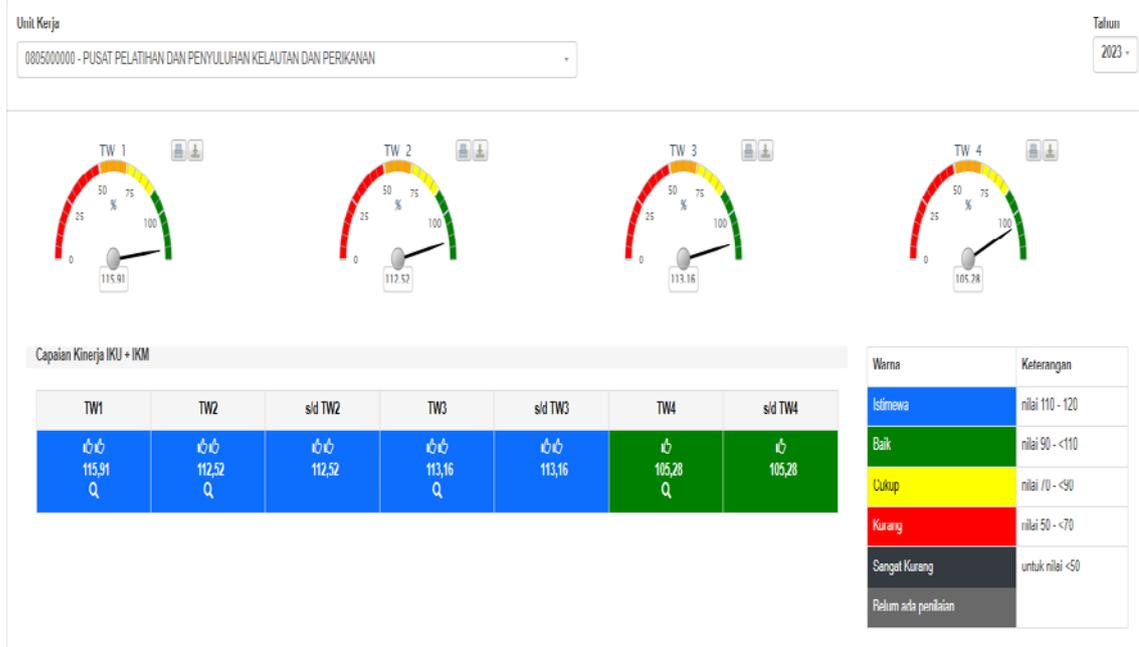
Rekomendasi :

- a. Menyiapkan kapasitas SDM pengelola keuangan untuk merespon berbagai perkembangan IT dalam pengelolaan keuangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan APBN yang dinamis;
- b. Melaksanakan pengawalan kepatuhan dalam pengelolaan UP/TUP, dan meningkatkan efisiensi penggunaan belanja operasional seperti perjalanan dinas, dan rapat-rapat di luar kantor

BAB IV PENUTUP

1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan 4 adalah 105,28% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	74,29	106,13
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	33.113	34.518	104,24
		3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768	13,100	120
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890	1.958	103,60
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137	144	105,11
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10	11	110,00
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9	9	100,00
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7	7	100,00
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000	47.612	101,30
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.980	2.047	103,38

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.400	3.758	110,53
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342	12.519	101,43
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)*	9	9	100,00
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	21	21	100,00
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10	10	100,00
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5	5	100,00
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960	5.716	115,24
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10	16	120
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	100	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1	1	100,00
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	100,00
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	93	94,63	101,75
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	93	116,58	120
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77	89,18	115,82
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5	0	120,00
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	80	80	100,00
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi	1	1	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PK 2023 (Desember)	CAPAIAN	%
			Pelayanan Publik			
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80	81,80	102,25

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun secara umum kinerja untuk tahun 2023 ini Puslatluh KP telah mampu merealisasikan target kinerjanya, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dengan rekomendasi sebagai alternatif solusi demi tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan sampai dengan Triwulan 4 tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu Data Dukung capaian masih belum rapi dan seragam dalam pengisian matrik capaiannya.

Rekomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja Puslatluh pada Triwulan mendatang, yaitu:

1. Membuat Surat Pengisian Form Capaian Kinerja serta Manual IKU kepada semua satker;
2. Mengadakan Pertemuan pendampingan data dukung dengan Satker lingkup Puslatluh secara continue;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi prioritas KKP dan Nasional.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.lkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.490
		3	Nilai PNBSP Sarker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.800
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)	6
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	22

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	6
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	4
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (Kelompok)	4.770
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Buah)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	75
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 128.466.010.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.000.000.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	Rp 525.061.966.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		Rp 656.527.976.000

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia


I Nyoman Radiarta

Jakarta, 5 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP


Lilly Aprilya Pregiwati

PK Revisi Tanggal 20 Juni 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Juni 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	32.224
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
56	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk (Kelompok)	3.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
7	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)	6
		14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	24

NO	SASARAN KEGLATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10
		16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5
9	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960
10	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)	75
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 130.247.884.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.621.087.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	Rp 528.578.214.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		Rp 662.447.185.000

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia


I Nyoman Radiarta

Jakarta, 24 Juni 2023
Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP


Lilly Aprilya Pregiwati



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : **Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : **Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	33.113
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.890
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
56	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.980
		11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk (Kelompok)	3.400
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
7	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	9
		14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	21

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10
		16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5
9	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.960
10	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	93
		23	Persentase unit kerja Puslatluh KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh (%)	≤ 0,5
		26	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	80
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslatluh KP (Inovasi)	1
		28	Penilaian Mandiri SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 130.247.884.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.621.087.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	Rp 527.977.723.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		Rp 661.846.694.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Lilly Aprilya Pregiwati